

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu:

1. Dalam pelaksanaan implementasi Perhutanan Sosial di Sub Lanskap Solok Selatan dalam program *Green Livelihoods Alliance* (GLA) terdapat 2 agenda yaitu pendampingan teknis dilapangan dan Advokasi dalam memberikan masukan dan saran kebijakan melalui pendekatan kolaborasi dan integrasi kegiatan Dimana implementasi program di mulai dari membangun perencanaan, integrasi program, pelaksanaan program dan monitoring dan evaluasi Program dengan melibatkan berbagai Stakeholder lintas sektor, level dan actor yang terdiri dari unsur pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten dan Nagari) Masyarakat, swasta, NGO.
2. Analisis peran Stakeholder menggunakan pendapat Brysson 2004 yang mengelompok Stakeholder kedalam kategori Subject, Players, Crowd dan Contest Setter dengan menggunakan penilaian kepentingan dan kekuasaan dan dipetakan sebagai berikut Stakeholder yang berperan sebagai Players adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, KKI Warsi, Pemerintah Nagari Pakan Rabaa, Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur, Pemerintah Koto Baru, Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru, Pemerintah Nagari Alam Pauh Duo, Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Timur, berperan sebagai Subject adalah KAN KPGD, KAN Koto Baru, LPHN Pakan Rabaa, LPHN Pasir Talang Timur, LPHN Koto Baru, LPHN Pulakek Koto Baru, LPHN Pakan Rabaa Timur, LPHN Jorong Simancuang, Kelompok Perempuan Pakan Rabaa, Kelompok Perempuan PASTATI JAYA, Kelompok Perempuan Pulakek Koto Baru, KUPS Simancuang, Kelompok Tani Simancuang. Berperan sebagai Contest Setter Kementerian KLHK, BPSKL Wilayah Sumatera, Kasubdit KPHL, Kasubdit KPHP, Kasubdit Kehutanan Kemendagri, Direktur Perencanaan Teknis pembangunan desa dan Pedesaan, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Kab. Solok Selatan, KPHL Hulu Batang Hari, Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, Dinas PUPR Kab. Solok Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok Selatan, Tenaga Ahli BP3MD. Berperan sebagai Crowd adalah BAMUS Pakan Rabaa, BAMUS Pasir Talang Timur, BAMUS Koto Baru, BAMUS Pulakek Koto Baru, BAMUS Pakan Rabaa Timur,

LPMN Nagari Pakan Rabaa, LPMN Nagari Pasir Talang Timur, LPMN Nagari Koto Baru, LPMN Nagari Pulakek Koto Baru, LPMN Pakan Rabaa Timur, Bhabinkantibmas, Bhabinsa, Wali Jorong, Ketua Pemuda, PT. Tidar Kerinci Agung, PT. Mitra Kerinci Kebun Liki, ICS, KPA WINALSA, PPO SANTIAGO, LBH Padang, WALHI Sumatera Barat, NTFP-EP.

Kemudian dianalisis menggunakan Pendekatan Nugroho 2004 dalam Pembangunan Stakeholder di klasifikasikan berdasarkan peranannya Stakeholder yang peranannya sebagai *Policy Creator* adalah Kementerian LHK, Gubernur Sumatera Barat dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Nagari Pakan Rabaa, Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur, Pemerintah Nagari Koto Baru, Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru, Pemerintah Nagari Alam Pauh Duo, Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Timur. Berperan sebagai Koordinator adalah KKI Warsi. Berperan sebagai Fasilitator adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Nagari Pakan Rabaa, Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur, Pemerintah Nagari Koto Baru, Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru, Pemerintah Alam Pauh Duo, Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Timur, dan KKI WARSI, berperan sebagai implementor adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Penyuluh Kehutanan, LPHN Pakan Rabaa, LPHN Pasir Talang Timur, LPHN Koto Baru, LPHN Pulakek Koto Baru, LPHN Jorong Simancunag, LPHN Pakan Rabaa Timur, Kelompok Perempuan Pakan Rabaa, Kelompok Perempuan PASTATI JAYA, Kelompok Perempuan Pulakek Koto Baru, KUPS Simancuang, Kelompok Tani Simancuang, KKI Warsi, KPA Winalsa dan PPO Santiago dan berperan sebagai *akselerator* adalah BPSKL Wilayah Sumatera, Kasubdit KPHL, Kasubdit KPHP, kasubdit Kehutanan Kemendagri, Direktur perencanaan teknis dan pembangunan desa dan pedesaan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bapedda Provinsi Sumatera Barat, Bapedda Kabupaten Solok Selatan, KPHL Hulu Batang Hari, Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, Dinas PUPR Kabupaten Solok Selatan, Tenaga Ahli BP3MD Kabupaten Solok Selatan, Penyuluh Kehutanan, Pemerintah Nagari Pakan Rabaa, Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur, Pemerintah Nagari Koto Baru, Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru, Pemerintah Alam Pauh Duo, Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Timur, Pemerintah Nagari Lubuk Malako, Pemerintah Nagari Lubuk Gadang Selatan, KAN KPGD, KAN Koto Baru, BAMUS Pakan Rabaa, BAMUS Pasir Talang Timur, BAMUS Koto Baru, BAMUS Pulakek Koto Baru,

BAMUS Pakan Rabaa Timur, LPMN Nagari Pakan Rabaa, LPMN Nagari Pasir Talang Timur, LPMN Nagari Koto Baru, LPMN Nagari Pulakek Koto Baru, LPMN Pakan Rabaa Timur, Bhabinkantibmas, Bhabinsa, Wali Jorong, Ketua Pemuda, PT. Tidar Kerinci Agung, PT. Mitra Kerinci Kebun Liki, Ketua Pemuda, KKI WARSI, ICS, KPA Winalsa, PPO Santiago, LBH Padang, WALHI Sumatera Barat, NTFP-EP.

3. Capaian dari pendekatan Stakeholder dalam Implementasi Perhutanan Sosial di Sublanskap Solok Selatan pada Program *Green livelihoods Alliance* (GLA) 1) Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Mengakomodir Perhutanan Sosial sebagai Pembangunan yang berkelanjutan. 2) Kolaborasi stakeholder melalui pengelolaan bersama Implementasi Perhutanan Sosial di Sub Lanskap Solok Selatan. 3) Integrasi Perencanaan melalui Penyelerasan Program Perhutanan Sosial di Sub Lanskap Solok Selatan. 4) Pengembangan Usaha berbasis potensi Sumber Daya Alam Lokal. faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah Komunikasi antar Stakeholder berjalan baik dan lancar, hal ini tidak lepas dari peran dari masing-masing Stakeholder. Dimana masing-masing Stakeholder memahami tugas dan fungsi masing-masing sehingga tupoksi tersebut dapat menjadi jembatan dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pihak atau lembaga terkait lainnya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut beberapa hal yang perlu di sarankan:

1. Diharapkan dalam Pelaksanaan program yang sejenis dengan penelitian ini, peran Stakeholder agar lebih ditingkatkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Pihak sehingga tidak ada peran yang dibebankan lebih ke Stakeholder lainnya. Sehingga terbangun kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik dan efektif
2. Berdasarkan analisis peran Stakeholder masih ada Stakeholder yang belum menjalankan perannya secara maksimal, walaupun tidak terlalu berdampak signifikan dalam pencapaian hasil namun secara peranannya pihak tersebut belum menjalankan perannya dengan baik.
3. Keberhasilan Capaian program ini di harapkan dapat menjadi model pengelolaan hutan berbasis Masyarakat yang inklusif dengan pola pendekatan kolaborasi

Stakeholder melalui koordinasi dan integrasi program implementasi perhutanan sosial.





